



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR KARTIKA MATUARI
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	2
II.	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	2
A.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	2
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	4
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	6
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	6
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	7
6.	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern	7
7.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7
8.	Rencana Bisnis BPR	7
9.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7
B.	Kepemilikan Saham Direksi	8
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	8
2.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	8
C.	Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR	8
1.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2.	Hubungan Keluarga Anggota direksi pada BPR	9
D.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	9
1.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
E.	Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR	9
1.	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
F.	Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
1.	Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
2.	Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
G.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	10
H.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
1.	Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	11
2.	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	12
I.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	12
J.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi	13
K.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	13
L.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	13
III.	HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)	13
IV.	PENUTUP	13

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KARTIKA MATUARI TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata kelola sangat diperlukan agar perbankan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang ketat serta dapat menerapkan etika bisnis, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat dan transparan.

Adapun Tata Kelola di Bank Perkreditan Rakyat harus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain: Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran

Dalam membuat laporan Tata Kelola maka BPR Kartika Matuari berusaha membuat sesuai dengan ketentuan yang ada.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Noldy H.W. Korengkeng
	NIK : 7106081810680003
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none">1. Menentukan Kebijaksanaan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan.2. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank/perusahaan dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas.3. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan.4. Menyusun RBB setiap tahun, bersama2 dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi.5. Mengadakan perubahan2 dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank.6. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang.7. Menyelenggarakan RUPS, bersama – sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi,.8. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku sebelumnya dalam RUPS Tahunan.9. Menandatangani surat2 berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ada.10. Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama2 yang

	<p>meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Membina dan menjaga hubungan baik pihak eksternal baik termasuk BI, OJK, Kantor Pelayanan Pajak, LPS, PPATK dan yang lainnya agar tercipta kerjasama dan bimbingan dari instansi-instansi tersebut. 12. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiiaannya kepada bank. 13. Bertanggung jawab terhadap pencapaian RBB yang telah disetujui oleh dewan komisaris. 14. Menandatangani laporan – laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak – pihak extern lainnya. 15. Mengendalikan dan mengawasi tugas – tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan bank.
2.	<p>Nama : Titiek Wahyunie Sugeng</p>
	<p>NIK : 7171034112720002</p>
	<p>Jabatan : Direktur</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas penyusunan garis – garis kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank. 2. Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan bank secara periodik dan berkesinambungan. 3. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran. 4. Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan. 5. Mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan – kegiatan pada setiap bagian. 6. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja. 7. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan bank. 8. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan. 9. Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi. 10. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan – bahan laporan untuk rapat – rapat Direksi dan Komisaris. 11. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya – biaya operasional. 12. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para Kepala Bidang unit kerja/bagian personalia, setelah dipertimbangkan dengan Direktur Utama. 13. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan sampai ke unit terbawah. 14. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perusahaan. <p>Tugas lain dalam jabatannya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & peraturan perundang2 yg berlaku,
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
8. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
9. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
11. Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- Direksi selalu berusaha memperhatikan tingkat kesehatan bank agar berada pada predikat Sehat.
- Laporan-laporan berusaha dibuat sesuai dengan standar pelaporan yang diminta dan dilakukan pelaporan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
- Direksi berusaha semaksimal mungkin untuk menekan NPL, walaupun ditahun 2021 NPL agak meningkat cukup tajam mencapai 15,16%.
- Demikian pula halnya dengan penjualan terutama Kredit yang diberikan, direksi berusaha untuk meningkatkan, tapi karena kondisi ekonomi dan faktor saingan yang semakin banyak sehingga di tahun 2021 penyaluran kredit terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya.
- Dan direksi dalam operasionalnya terutama dalam pemberian kredit berusaha senantiasa melaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Ruslan Abdul Gani
	NIK : 7371131807640006
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham. 2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai

	<p>hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris. 4. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat. 5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari. 6. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas. 8. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi. 9. Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.
2.	Nama : Rudolf Dompas
	NIK : 7171090106400001
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis. 4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait; 8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham. 9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja. 10. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senantiasa memperhatikan tingkat kesehatan bank - Senantiasa memperhatikan kewajiban pelaporan kepada OJK dan pihak terkait lainnya. - Menekan NPL - Meningkatkan penjualan terutama Kredit sebagai sumber penghasilan BPR - Senantiasa dalam melaksanakan operasional bank terutama dalam pemberian kredit

berdasarkan pada prinsip ke hati-hatian.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
2.	Komite Pemantau Resiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Resiko	Remunerasi dan Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -

BPR Kartika Matuari belum membentuk komite-komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris, karena dalam POJK No.4/POJK.03/2015 disebutkan bahwa pembentukan komite hanya diwajibkan bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp.80.000.000,- (delapan puluh miliar).

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2021 tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan operasional maka setiap BPR wajib memastikan kepatuhannya terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Saat ini BPR Kartika Matuari telah memiliki perangkat untuk memastikan kepatuhan BPR, antara lain telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

b. Penerapan Audit Intern

Sebagai BPR dengan Modal inti dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka BPR Kartika Matuari memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern. Walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena merangkap bagian lain.

c. Penerapan Audit Ekstern

Sehubungan dengan aset BPR sampai dengan akhir tahun 2021 masih dibawah Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sehingga belum menggunakan audit ekstern atau Akuntan Publik.

6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

Dengan semakin majunya perkembangan perekonomian saat ini maka dituntut pula dunia perbankan untuk semakin berkembang sehingga tingkat resiko yang dihadapi semakin kompleks dan beragam, sehingga setiap perbankan yang ada harus siap membekali diri untuk menangkal segala resiko yang mungkin terjadi, sehingga setiap resiko yang ada dapat sesegera mungkin terdeteksi dan dapat diantisipasi penanganannya.

BPR Kartika Matuari telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen Resiko yang dibuat oleh direksi dan disetujui oleh komisaris.

7. Batas maksimum pemberian kredit

Sesuai POJK 49/POJK.03/2017 Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR.

Selama tahun 2021 tidak ditemukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK pada BPR Kartika Matuari.

8. Rencana bisnis BPR

Tahun 2021 BPR Kartika Matuari telah membuat Rencana Bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Rencana Bisnis BPR Kartika Matuari untuk tahun 2021 sudah dibuat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Tahun 2021 BPR Kartika Matuari telah menyusun dan menyajikan kemudian menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

a. Transparansi Kondisi Keuangan

Hal ini tercermin dari laporan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan antara lain :

- Laporan Publikasi
- Laporan Tahunan

Laporan- laporan tersebut dilaporkan sesuai dengan waktu dan tata cara pelaporan yang seharusnya sesuai dengan POJK No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

b. Transparansi Non Keuangan

Informasi kondisi non keuangan BPR ditahun 2021 adalah antara lain :

- Jaringan kantor
 - ✓ Kantor Pusat, beralamat di Jl. Kompleks Gereja Petra No.190 Kelurahan Kinilow Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.
 - ✓ Kantor Cabang, tidak ada
 - ✓ Kantor Kas, 1 kantor beralamat di Komplek Pasar Tomohon.
- Produk BPR saat ini :
 - ✓ Kredit
 - Kredit Modal Kerja
 - Kredit Konsumtif
 - Kredit Investasi
 - ✓ Simpanan
 - Tabungan
 - Deposito

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Noldy H.W.Korengkeng	7106081810680003	-	-
2.	Titiek W.Sugeng	7171034112720002	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Noldy H.W.Korengkeng	7106081810680003	-	-	-
2.	Titiek W.Sugeng	7171034112720002	-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Noldy H.W.Korengkeng	7106081810680003	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan
2.	Titiek W.Sugeng	7171034112720002	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Noldy H.W.Korengkeng	7106081810680003	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan
2.	Titiek W.Sugeng	7171034112720002	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ruslan Abdul Gani	7371131807640006	840.000.000,-	34,52%
2.	Rudolf Dompas	7171090106400001	7.000.000,-	0,29%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ruslan Abdul Gani	7371131807640006	-	-	-
2.	Rudolf Dompas	7171090106400001	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan, atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ruslan Abdul Gani	7371131807640006	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan	Ruslan A. Gani – Ybs Indrawati Gani – Istri
2.	Rudolf Dompas	7171090106400001	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan	Rudolf Dompas – Ybs

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ruslan Abdul Gani	7371131807640006	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan	Ruslan A. Gani – Ybs Indrawati Gani – Istri
2.	Rudolf Dompas	7171090106400001	Tidak ada Hubungan	Tidak ada Hubungan	Rudolf Dompas – Ybs

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	199.980.000	2	61.980.000
2.	Tunjangan	2	58.011.527	2	5.165.000
3.	Tantiem	2	43.264.347	2	46.869.710
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total		2	301.255.874	2	114.014.710

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	2	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	:
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,70	: 1
Rasio Gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terenda (b)	1,07	: 1

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,09 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,20 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,25 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	02 Maret 2021	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Fisik kas. - Membahas Tingkat Kesehatan bank. - Membahas pencapaian dan hasil pengawasan RBB 2020, Rencana RBB 2021. - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. - Pemenuhan laporan2 Kepada OJK dan pihak lain. - Membahas issue-isue terkini. - Mengingatkan Direksi dalam operasionalnya untuk selalu berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. - Permodalan BPR. - Lain-lain.
2.	06 April 2021	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Fisik kas. - Membahas Tingkat Kesehatan bank. - Mempertegas fungsi pengawasan Dewan Komisaris. - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. - Manajemen resiko harus diperhatikan. - Membahas issue-isue terkini. - Lain-lain.
3.	09 Juli 2021	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Fisik kas. - Membahas Tingkat Kesehatan bank. - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. - Pemenuhan laporan2 Kepada OJK dan pihak lain. - Membahas issue-isue terkini. - Lain-lain.
4.	12 Oktober 2021	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Fisik kas. - Membahas Tingkat Kesehatan bank.

			<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Bisnis - Memaksimalkan fungsi Internal Audit BPR. - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. - Pemenuhan laporan2 Kepada OJK dan pihak lain. - Membahas isue-isue terkini. - Mengingatkan Direksi senantiasa untuk melaksanakan APU/PPT. - Membahas tentang penyetoran modal yang belum terealisasi. - Pemenuhan action plan Modal Inti yang belum bisa terpenuhi. - Mencari calon investor baru. - Lain-lain.
--	--	--	---

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Tele-konferensi	
1.	Ruslan Abdul Gani	7371131807640006	4	0	100%
2.	Rudolf Dompas	7171090106400001	4	0	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Selama tahun 2021 PT.BPR Kartika Matuari tidak memiliki permasalahan hukum yang dihadapi.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2021 PT.BPR Kartika Matuari tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-	-

III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Hasil penilaian sendiri (Self Assesment) mendapat nilai komposit 1,98 dengan predikat baik.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Tata kelola ini telah dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan juga sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Kiranya laporan ini dapat diterima dengan baik.

Tomohon, 22 April 2022

PT. BPR KARTIKA MATUARI



RUSLAN ABDUL GANI

Komisaris Utama

NOLDY H.W. KORENGKENG

Direktur Utama